

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKjIP )  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021**



Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Tlp/Fax: 0733-4540041  
Website : [www.dinsos.musirawaskab.go.id](http://www.dinsos.musirawaskab.go.id), Email : [dinsos@musirawaskab.go.id](mailto:dinsos@musirawaskab.go.id)

**2 0 2 2**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan menyajikan Data sebagai bahan penyusunan LKjIP, Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Strategis ( Resntra ), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pembangunan kesejahteraan sosial.

Muara Beliti, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**AGUS SUSANTO, A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731213 199311 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DATA UMUM TENTANG ORGANISASI**

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

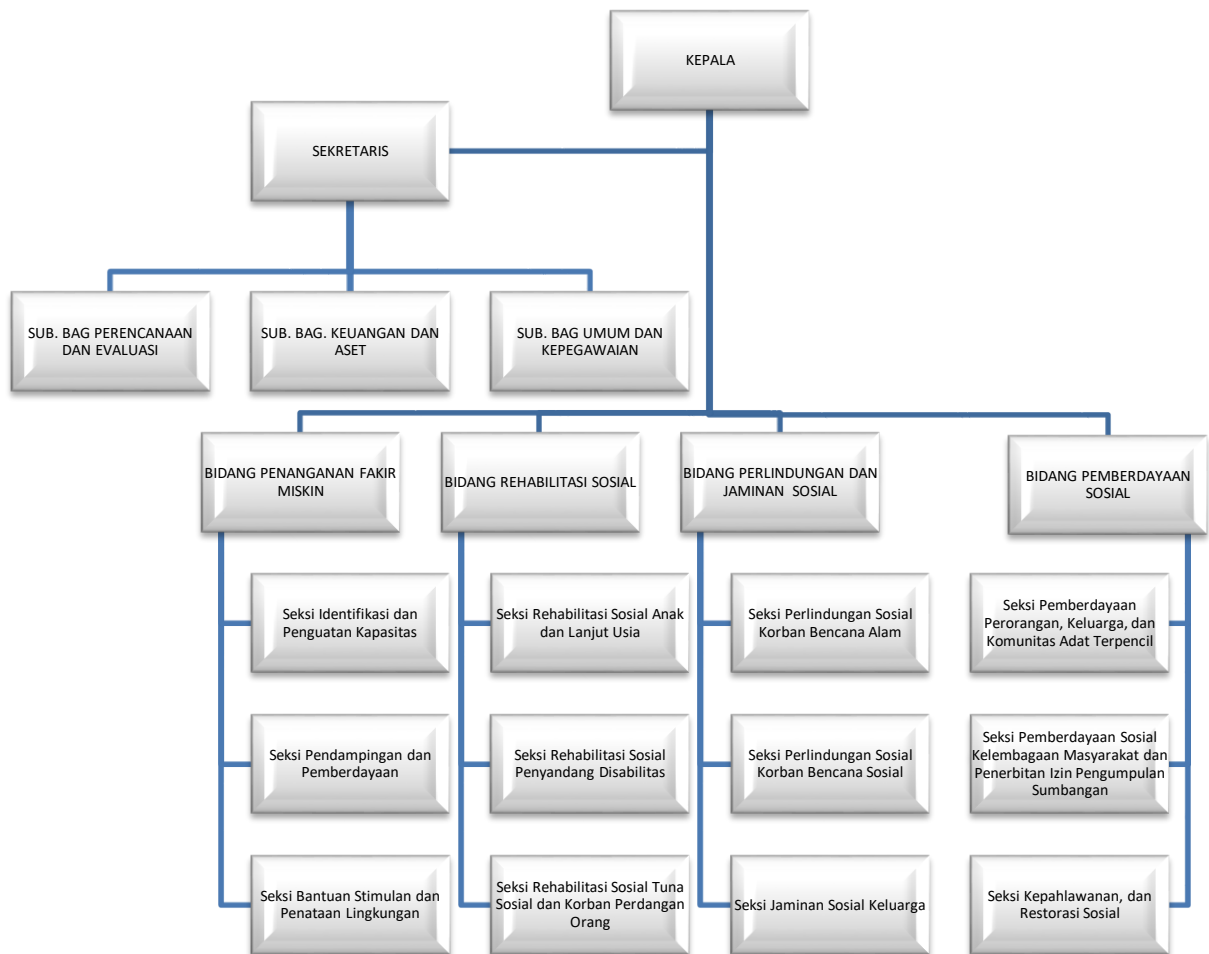
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas terdiri dari ;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Subbag Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Subbag Keuangan dan Aset
  - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
  - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;
  - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
  - c. Seksi Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.
  
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Gambaran secara umum Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi  
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**



### C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Meningkatnya kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penggambaran tujuan sebagai implementasi visi dan misi organisasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1.Misi - Tujuan  
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**

No	Misi	Tujuan
1	Memperkuat ketahanan Ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan misi. Sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Meningkatnya kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 3. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Dinas Sosial.

Gambaran korelasi tujuan dan sasaran organisasi serta indikator kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2 Tujuan – Sasaran  
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**

<i>No</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>
<i>Misi Keempat</i>			
1	1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS.	1.1 Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar.	1.1.1. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar
		1.2. Meningkatnya kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	1.2.1. Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
		1.3. Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi Dinas Sosial	1.3.1 Nilai Sakip Dinas Sosial. 1.3.2. Profesionalitas ASN Dinas Sosial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam



suatu lingkungan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya bimbingan teknis kewirausahaan bagi PMKS.
2. Terlaksananya bantuan stimulan penunjang usaha bagi PMKS.
3. Terlaksananya bantuan kebutuhan dasar bagi komunitas adat terpencil.
4. Terlaksananya penyaluran Bantuan Pangan tepat sasaran.
5. Terlaksananya rehabilitasi sosial di luar panti terhadap lansia terlantar.
6. Terlaksananya rehabilitasi sosial di luar panti terhadap anak terlantar.
7. Terlaksananya rehabilitasi sosial di luar panti terhadap penyandang disabilitas terlantar.
8. Terlaksananya rehabilitasi sosial di luar panti terhadap tuna sosial terlantar.
9. Terlaksananya pemberian bantuan orang terlantar untuk kembali ke daerah asal / tujuan.
10. Terlaksananya fasilitasi adminduk PMKS.
11. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam.
12. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial.
13. Terlaksananya Data KPM Jaminan Sosial yang falid.
14. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerima bansos.

15. Terlaksananya pemberian bantuan PKH untuk perbaikan pendidikan dan kesehatan KPM.
16. Tersedianya data PSKS yang valid.
17. Terlaksananya bimbingan teknis bagi pekerja sosial.
18. Terlaksananya bimbingan teknis bagi organisasi sosial.
19. Terlaksananya bimbingan teknis bagi TARUNA SIAGA BENCANA.
20. Terlaksananya bimbingan teknis bagi generasi muda dalam rangka penguatan nilai-nilai kepahlawanan.
21. Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.
22. Tersedianya BMD yang tepat waktu.
23. Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan.
24. Tersedianya laporan kinerja yang tepat waktu.
25. Terselenggaranya bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan kompetensi.
26. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan SKP.
27. Terselenggaranya entri data e-Remunerasi Kinerja.
28. Terselenggaranya sosialisasi PP 53 tahun 2010.
29. Terselenggaranya absensi elektronik.

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi adalah:

- a. Besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jumlah PMKS dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3.

Rekapitulasi

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014-2021

Tahun	Jumlah PMKS
2016	151.400

2017	156.432
2018	105.018
2019	158.102
2020	161.078
2021	223.149

Sumber data : Basis Data Terpadu ( BDT ) tahun 2016 dan 2021

Besaran jumlah PMKS ini dapat juga dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1.1.

Grafik DTKS Kabupaten Musi Rawas  
dari Tahun 2016-2021

Keterangan :

Dari grafik tersebut terlihat ada kenaikan signifikan di tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021, masyarakat sendiri boleh mengusulkan keluarga miskin yang masuk dalam DTKS KEMENSOS RI.

- b. Masih terbatasnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang sungguh-sungguh terbebani dalam pekerjaan kesejahteraan sosial.

SDM Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas kurang kualitas maupun kuantitasnya. Maka SKPD merekrut tenaga sukarela masyarakat untuk menjadi mitra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas. Tenaga sukarela tersebut direkrut untuk menjadi Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK), Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dll.

Jumlah anggaran yang minim pun menjadi permasalahan yang utama bagi SKPD. Tahun 2021 anggaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dana APBD, anggaran Kegiatan dan gaji ASN ( 15.009.195.224.- ) hanya 0,71 % dari total APBD Kabupaten Musi Rawas ( 2.106.055.292.303.- )

Permasalahan selanjutnya adalah sarana dan prasarana terutama peralatan penanggulangan bencana. Alat-alat bencana seperti perahu telah rusak dan tidak memiliki alat angkutan untuk mengantar bantuan bencana.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi SKPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun SKPD memiliki dua tujuan yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholder* (Bupati, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.

## E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2021 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

- Bab I** **Pendahuluan** terdiri dari Data Umum Organisasi, Struktur organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis) Organisasi, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penyajian.
- Bab II** **Perencanaan Kinerja** terdiri dari Rencana Strategis, Renja dan Perjanjian Kinerja
- Bab III** **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.**
- A. Capaian Kinerja Organisasi
    - A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional (jika ada)

A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A.6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya.

A.7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaiannya pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

**Bab IV Penutup** terdiri dari Simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi, dan Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matrik Renstra (RS)
- Rencana Kinerja Tahunan (Renja)
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja (PK)

(Lampiran memuat Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu)

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menjadi pedoman penyusunan program kerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang berkembang kian kompleks seiring berkembangnya kehidupan masyarakat.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, disusun suatu rencana kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berhasil di Kabupaten Musi Rawas maka diperlukan visi dan misi (jangka menengah) yang jelas agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (jangka pendek).

Bertitik tolak pada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, yaitu “ **MUSI RAWAS MANTAB ( Maju, Mandiri, dan Bermartabat )**, maka Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas berusaha mewujudkannya melalui salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dinas sosial mempunyai tugas utama yaitu :

1. Meningkatnya Ke mampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasa.
2. Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam Penyeleng garaan Kesejah teraan Sosial.

**TABEL A.1**  
**Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penang gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Ke mampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	94	95	101	Bidang Rehabilit asi Sosial
Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam Penyeleng garaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyeleng garaan kesejahteraan sosial	%	55	60	109,09	Bidang Pember dayaan Sosial



## B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat kabupaten, memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKPD tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta mengacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam Renja SKPD tahun 2021 dijabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi di tahun yang bersangkutan.

Program dan kegiatan yang dilakukan SKPD menggambarkan domain Program dan kegiatan SKPD jika dihubungkan dengan Renja dan Renstra SKPD akan terlihat seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**  
**berdasarkan Renja Tahun 2021**

No	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir	Bid. Pemberdayaan Sosial

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	
		Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Bid. Penanganan Fakir Miskin
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Bid. Penanganan Fakir Miskin
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil	Bid. Pemberdayaan Sosial
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Bid. Penanganan Fakir Miskin
		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Bid. Penanganan Fakir Miskin
		Perlindungan Sosial Korban Bencana	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai	Bid. Penanganan Fakir Miskin

3.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan Anak Terlantar	Bid. Rehabsos
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Bid. Rehabsos
5.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Bid. Rehabsos
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Bid. Orbansos
		Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Bid. Orbansos
		Peringatan Hari Besar Nasional	Bid. Pemberdayaan Sosial
		Peningkatan Kualitas Karang Taruna	Bid. Pemberdayaan Sosial
7.	Program Pembinaan Lanjut Usia	Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia	Bid. Orbansos
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	
		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	

		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa pendukung Administrasi Teknis perkantoran Penyediaan jasa dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat

		Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor	
9.	Program Peningkatan disiplin Aparatus	Pengadaan mesin / kartu absensi	Sekretariat
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Kinerja di SKPD	Sekretariat
		Monitoring dan Evaluasi	

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dengan strategi yang tepat. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok. Perencanaan Kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 dengan Bupati Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Dalam Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang

dianggarkan. Perencanaan Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	94
2	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Dinas Sosial	Nilai sakiip Dinas Sosial	71,7
		Profesionalisme ASN Dinas Sosial	60

Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas mendapat dana APBD sebesar Rp. 17.306.479.900,-. Dana tersebut terbagi dalam untuk pelaksanaan 12 ( Dua belas) program dan 43 ( Empat puluh tiga) kegiatan pembangunan terdiri dari 7 ( Tujuh) program wajib dan 5 ( Lima) program rutin. Uraian anggaran SKPD per program dapat dilihat dalam rincian di bawah ini :

Tabel 2.4.

Rincian Anggaran Dana Per Program APBD  
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp354.083.650	APBD
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp15.543.195.400	APBD
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp7.392.400	APBD
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp113.160.300	APBD
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp7.308.300	APBD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp204.519.650	APBD
7	Program Pembinaan Lanjut Usia	Rp31.103.928	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp640.324.272	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp290.590.000	APBD
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp9.435.000	APBD
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp10.982.800	
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp94.384.200	APBD
	<b>Jumlah Anggaran Tahun 2021</b>	<b>Rp17.306.479.900</b>	

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra SKPD.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

<i>memuaskan</i>	: 85-100 %
<i>sangat baik</i>	: 75-85%,
<i>baik</i>	: 65 - 75%,
<i>cukup</i>	: 50 - 65 %,
<i>kurang</i>	: 0-50 %,
<i>sangat kurang</i>	: 0-30%.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas TA 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	94	95	101%
2	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55	60	109,09%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Dinas Sosial	Nilai sakiq Dinas Sosial	71,7	70,1	97,77%
		Profesionalisme ASN Dinas Sosial	60	52,3	87,17%

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Tabel Perbandingan**  
**Capaian Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir**  
**Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana				Realisasi (%)				Ket
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85	85	87	90	86,24	86,63	86,5	89,7	Naik
2	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40	50	53	55	45	59	58	60	Naik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Dinas Sosial	Nilai sakiP Dinas Sosial	50	55	60	71,5	64,33	65,14	71,49		Naik
		Profesionalisme ASN Dinas Sosial	40	45	50	60	50	52	52,3		Naik

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir Renstra Tahun 2026 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Tabel Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2026 dengan Realisasi s.d. Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Realisasi s.d tahun 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	96	89,7	93,44%
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80	60	75%
3	Nilai sakiip Dinas Sosial	Nilai	72	70,1	97,36%
4	Profesionalisme ASN Dinas Sosial	Nilai	75	52,3	69,73%

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial yang disahkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota menjadi standar nasional bagi pelayanan bidang sosial ke masyarakat.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional tersebut digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021**  
**Dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d tahun 2021	Realisasi Standar Nasional 2021	Prosentase
-1	-2	-3	-4	-5	(6=5/4x100)
1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	89,7		
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	75		
3	Nilai sakiq Dinas Sosial	Nilai	70,1		
4	Profesionalisme ASN Dinas Sosial	Nilai	52,3		

Ket :

(-) : indikator tidak tercantum dalam SPM Nasional bidang sosial

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga telah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2013 tanggal 10 September 2013 tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.  
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021  
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial  
Kabupaten Musi Rawas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja 2021	Standar Nasional tahun 2021	Capaian
1	Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	89,6	100	89,60%
2	Prosentase (%) Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	89,86	100	89,86
3	Prosentase (%) Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	99,99	100	99,99
4	Prosentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100
5	Prosentase (%) korban bencana daerah dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Target kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 hampir tercapai seluruhnya.

Hal ini didukung beberapa hal antara lain :

Dukungan pemerintah daerah

Hal ini dibuktikan dengan alokasi dana dalam APBD Kabupaten Musi Rawas tiap tahun bagi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

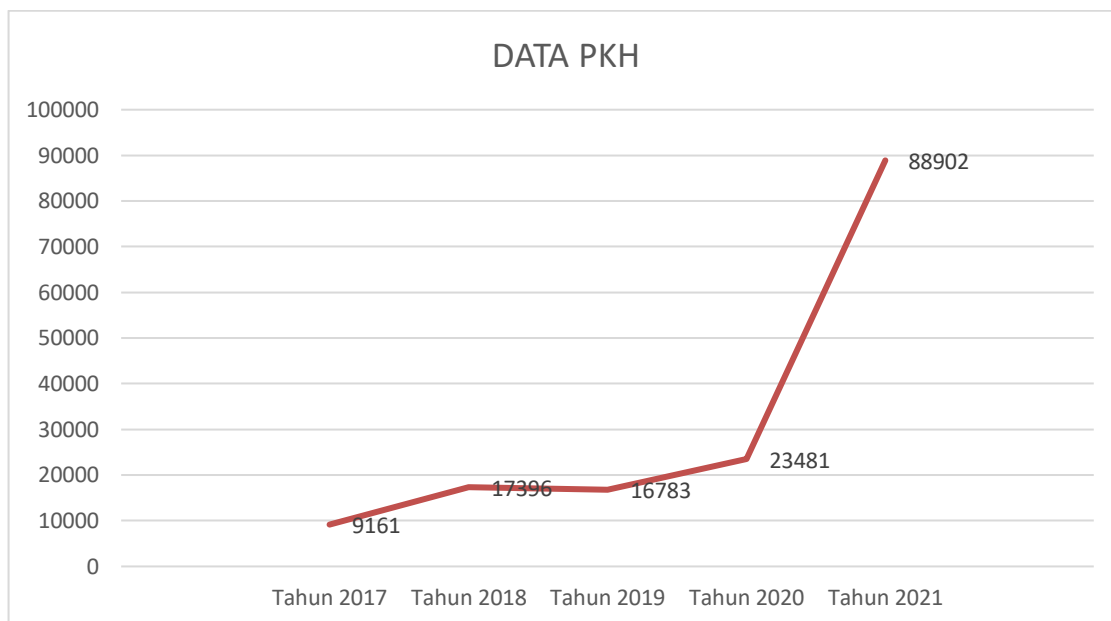
Meningkatnya kualitas SDM pegawai Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas

Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kesejahteraan sosial di SKPD diatasi dengan melibatkan anggota masyarakat menjadi mitra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas. Para mitra ini ternyata sangat membantu capaian kinerja SKPD misalnya dalam pendampingan PMKS, pendataan dan validasi data PMKS yang akan mendapat bantuan.

Koordinasi yang baik antara daerah dan pusat

Koordinasi yang baik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kecamatan yang menerima dana PKH. tahun 2021 semua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas menerima dana PKH dengan dana sebesar Rp 67.338.778.000,- untuk 1 (satu) tahun. Dalam grafik berikut disajikan jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima dana PKH tahun 2021 sebagai berikut :

**Grafik 3.1.**  
**Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM)**  
**Penerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Tahun 2017 s.d 2021**



Tahun 2017 yang menerima dana PKH sebanyak 9.161 KK. Tahun 2018 naik menjadi 17.396 KK kenaikan penerima PKH dikarenakan ada perluasan penerima yaitu penyandang cacat dan lansia, Tahun 2019 penerima PKH menjadi 16.783 KK. Mengalami penurunan dikarenakan ada KPM yang meninggal, pindah dan sudah dikatakan mampu dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sangat yaitu 23.481 KK, dan di tahun 2021 sejumlah 88.902 KPM Dikarenakan ada pandemi covid 19.

SKPD tetap berusaha menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dengan menurunnya penerima PKH sebagai indikator bahwa jumlah KK miskin juga menurun.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pengadaan sarana dan prasarana aparatur berperan ikut serta meningkatkan capaian kinerja



organisasi. Dengan sarana yang lebih baik tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat, efektif dan efisien.

Target Renstra SKPD tahun 2017-2021 secara garis besar telah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh besarnya komitmen SKPD untuk melaksanakan pembangunan sosial sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Indikator jumlah PMKS yang ditangani sampai dengan tahun 2021 PMKS yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas yaitu :

1. Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang di Fasilitas berjumlah 112 orang dari target Renstra 120 orang, 107 %
2. Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha berjumlah 310 orang dari target Renstra 310 orang, 100 %
3. Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana Usaha 470 orang dari target renstra 470 ( 100% )
4. Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan usaha berjumlah 210 orang dari target renstra 185 ( 135 % )
5. Jumlah Pendamping dan operator PKH yang mendapatkan fasilitas sejumlah 283 orang dari target renstra 298 ( 0,94 % )
6. Jumlah TAGANA yang disiapkan-siagakan berjumlah 120 orang dari target rentra 120 ( 100 % )
9. Jumlah anak telantar dan bermasalah sosial yang mendapatkan pelatihan ketrampilan sejumlah 100 orang dari target renstra 100 ( 100 % )
10. Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan bantuan sejumlah 152 orang dari target renstra 148 orang ( 102 % )
11. Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan pembinaan dan Pelatihan sejumlah 140 orang dari target renstra 140 orang (100 % )

12. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sejumlah 58 LKS dari target renstra 58 LKS ( 100 % )
13. Jumlah Lansia yang mendapatkan pelayanan Home Care berjumlah 90 rang dari target renstra 90 orang, 100 %

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional bidang sosial yang menjadi standar pelayanan kesejahteraan sosial di daerah juga belum tercapai sepenuhnya. Indikator yang belum tercapai yaitu : jumlah PMKS yang ditangani. Target nasional yang harus dicapai adalah 100% dari total jumlah PMKS yang ada di kabupaten. Target tersebut harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021. Sementara tahun 2021 ini PMKS yang berhasil ditangani 99,15% saja. Masalah anggaran selalu menjadi alasan utama belum tercapainya target tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri untuk menangani jumlah PMKS yang demikian besar dibutuhkan dana yang besar pula. SKPD berupaya agar dapat mewujudkan target dimaksud dengan melakukan berbagai upaya antara lain :

- a) Mengusulkan lebih banyak anggaran bagi kegiatan yang mendukung pencapaian target SPM Bidang Sosial dalam APBD kabupaten tahun berikutnya
- b) Melakukan koordinasi dengan pusat dan provinsi untuk mendapatkan program-program pembangunan kesejahteraan sosial.

#### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana diusahakan seefisien mungkin. Sumber daya manusia digunakan mulai proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan lanjutan dan pelaporan.

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Rincian Penggunaan Sumberdaya Keuangan Dan Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Keuangan			Sumber daya manusia		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	% capaian
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5x100	8	9	10
1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>23.249.750</b>	<b>6.429.400</b>	<b>27,65%</b>			
			<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>23.249.750</b>	<b>6.429.400</b>	<b>27,65%</b>			
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.249.750	6.429.400	27,65%	25	6	24,00%
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>849.372.800</b>	<b>837.175.760</b>	<b>98,56%</b>			
			<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>849.372.800</b>	<b>837.175.760</b>	<b>98,56%</b>			
			Penyediaan Permakanan	76.437.100	76.401.060	99,95%	50	50	100,00%
			Penyediaan Sandang	37.500.100	37.442.300	99,85%	50	50	100,00%

	Penyediaan Alat Bantu	150.214.000	149.214.000	99,33%	31	31	100,00%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	55.305.800	49.374.800	89,28%	30	30	100,00%
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	57.000.000	51.972.600	91,18%	50	50	100,00%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	472.915.800	472.771.000	99,97%	71	71	100,00%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>7.369.491.350</b>	<b>7.231.411.080</b>	<b>98,13%</b>			
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>56.341.900</b>	<b>56.333.900</b>	<b>99,99%</b>			
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	56.341.900	56.333.900	99,99%	35	35	100,00%
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.313.149.450</b>	<b>7.175.077.180</b>	<b>98,11%</b>			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	266.250.000	238.714.000	89,66%	199	199	100,00%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.669.400.000	6.561.614.530	98,38%	1967	1967	100,00%
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	377.499.450	374.748.650	99,27%	110	110	100,00%
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.826.363.100</b>	<b>1.814.389.000</b>	<b>99,34%</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>1.620.488.100</b>	<b>1.609.230.800</b>	<b>99,31%</b>			
	Penyediaan Makanan	1.572.220.500	1.569.383.000	99,82%	4688	4688	100,00%
	Penyediaan Sandang	48.267.600	39.847.800	82,56%	30	30	100,00%
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>205.875.000</b>	<b>205.158.200</b>	<b>99,65%</b>			

			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.875.000	205.158.200	99,65%	30	30	100,00%
2	Meningkatnya kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>536.705.400</b>	<b>508.216.500</b>	<b>94,69%</b>			
			<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>105.676.900</b>	<b>104.471.500</b>	<b>98,86%</b>			
			Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	67.724.300	67.724.300	100,00%	75	150	200,00%
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	37.952.600	36.747.200	96,82%	3	3	100,00%
			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>431.028.500</b>	<b>403.745.000</b>	<b>93,67%</b>			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	100,00%	14	14	100,00%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.795.600	126.820.200	97,71%	14	14	100,00%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.232.900	204.924.800	89,40%	75	75	100,00%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Dinas Sosial	Nilai Sakip Dinas Sosial	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.404.012.824</b>	<b>4.277.651.550</b>	<b>97,13%</b>			
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>160.214.700</b>	<b>160.214.400</b>	<b>100,00%</b>			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.218.150	39.217.850	100,00%	12	12	100,00%

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.776.050	15.776.050	100,00%	8	8	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.275.800	14.275.800	100,00%	8	8	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.775.800	18.775.800	100,00%	8	8	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.275.800	14.275.800	100,00%	8	8	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.775.800	18.775.800	100,00%	12	12	100,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.117.300	39.117.300	100,00%	12	12	100,00%
	Profesionalitas ASN Dinas Sosial	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.229.799.250</b>	<b>3.120.311.257</b>	<b>96,61%</b>			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.116.541.450	3.012.813.457	96,67%	33	33	100,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.425.600	83.665.600	93,56%	6	6	100,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.832.200	23.832.200	100,00%	6	6	100,00%
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.076.800</b>	<b>9.076.800</b>	<b>100,00%</b>			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.076.800	9.076.800	100,00%	6	6	100,00%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>260.587.100</b>	<b>260.379.400</b>	<b>99,92%</b>			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.236.400	4.236.400	100,00%	1	1	100,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.015.300	44.015.300	100,00%	1	1	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.282.200	69.272.200	96,00%	3	3	100,00%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.053.200	142.855.500	90,00%	2	2	100,00%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>100,00%</b>			
	Pengadaan Mebel	31.500.000	31.500.000	100,00%	1	1	100,00%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>448.523.524</b>	<b>442.980.793</b>	<b>95,73%</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00%	1	1	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.150.996	37.618.975	87,18%	1	1	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.872.528	403.861.818	100,00%	20	20	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>264.311.450</b>	<b>253.188.900</b>	<b>95,79%</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.815.200	58.329.700	88,63%	2	2	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.996.250	182.359.200	98,04%	1	1	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	12.500.000	100,00%	1	1	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>15.009.195.224</b>	<b>14.675.273.290</b>	<b>97,78%</b>			





Dari tabel di atas digambarkan usaha efisiensi penggunaan sumber daya dan sumber dana bagi pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya dilaksanakan dengan hal-hal sebagai berikut :

Pengaturan pemanfaatan sumber dana semaksimal mungkin.

Sumber dana yang terbatas diatur sedemikian rupa untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pengaturan penggunaan SDM pun diatur seefisien mungkin. SDM digunakan pada tahap :

Perencanaan

Dilaksanakan oleh bagian program dengan melakukan koordinasi dengan petugas-petugas yang lain. Misal : bagian data, kasi dan kabid yang membidangi, bagian keuangan.

Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan oleh pejabat dan staf sesuai dengan tupoksi. Dibantu dengan kepanitiaan sesuai kebutuhan dan mitra Dinas Sosial.

Pembinaan Tim-tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan benar-benar diterjunkan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pelaporan

Dilaksanakan oleh bagian program dengan menghimpun laporan dan melakukan monitoring masing-masing kegiatan.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan pernyataan kinerja tahun 2021 SKPD telah berkomitmen untuk melaksanakan 12 program dan 43 kegiatan baik rutin maupun wajib, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
A	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
D	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
E	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
16	Pengadaan Mebel
F	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>

21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
H	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>
25	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
26	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
I	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
29	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
III	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
J	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>
30	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
IV	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
K	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
31	Penyediaan Permakanan
32	Penyediaan Sandang
33	Penyediaan Alat Bantu
34	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
35	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
36	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
V	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>

L	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>
37	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
M	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
38	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
39	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
40	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
VI	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
N	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>
41	Penyediaan Makanan
42	Penyediaan Sandang
O	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>
43	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Dari capaian kinerja per indikator diatas terdapat 6 program, 15 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan yang tingkat capaian rata-rata diatas 97 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh anggaran yang mencukupi, etos kerja yang tinggi dan koordinasi yang baik antar personel dan mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

SKPD menetapkan 2 ( Dua) indikator dan 2 ( Dua ) target dengan input dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas.

Anggaran dan realisasi dana yang dicapai untuk Tahun 2021 berdasarkan akuntabilitas keuangan dan jenis belanja sebagai berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran APBD (Rp)	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=12/1x100)
] / 1	Meningkatnya Kemampuan PMKS Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar				<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>29.999.750</b>	<b>23.249.750</b>	<b>6.429.400</b>	<b>27,65%</b>
						Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>29.999.750</b>	<b>23.249.750</b>	<b>6.429.400</b>	<b>27,65%</b>
			25	6	24,00%	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	29.999.750	23.249.750	6.429.400	27,65%
						<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.126.400.000</b>	<b>849.372.800</b>	<b>837.175.760</b>	<b>98,56%</b>

				<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.126.400.000</b>	<b>849.372.800</b>	<b>837.175.760</b>	<b>98,56%</b>
	50	50	100,00%	Penyediaan Permakanan	100.000.100	76.437.100	76.401.060	99,95%
	50	50	100,00%	Penyediaan Sandang	50.000.100	37.500.100	37.442.300	99,85%
	31	31	100,00%	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	150.214.000	149.214.000	99,33%
	30	30	100,00%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75.000.000	55.305.800	49.374.800	89,28%
	50	50	100,00%	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	75.000.000	57.000.000	51.972.600	91,18%
	71	71	100,00%	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	626.399.800	472.915.800	472.771.000	99,97%
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>830.499.350</b>	<b>7.369.491.350</b>	<b>#####</b>	<b>98,13%</b>
				<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>74.999.900</b>	<b>56.341.900</b>	<b>56.333.900</b>	<b>99,99%</b>
	35	35	100,00%	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	74.999.900	56.341.900	56.333.900	99,99%
				<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>755.499.450</b>	<b>7.313.149.450</b>	<b>#####</b>	<b>98,11%</b>
	199	199	100,00%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	355.000.000	266.250.000	238.714.000	89,66%
	1967	1967	100,00%	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.499.450	6.669.400.000	6.561.614.530	98,38%

			110	110	100,00%	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.952.388.900	377.499.450	374.748.650	99,27%
						<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.652.394.100</b>	<b>1.826.363.100</b>	<b>##### ###</b>	<b>99,34%</b>
						<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	1.589.870.500	<b>1.620.488.100</b>	<b>#####</b>	<b>99,31%</b>
			4688	4688	100,00%	Penyediaan Makanan	62.523.600	1.572.220.500	1.569.383.000	99,82%
			30	30	100,00%	Penyediaan Sandang	<b>299.994.800</b>	48.267.600	39.847.800	82,56%
						<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	29.995.000	<b>205.875.000</b>	<b>205.158.200</b>	<b>99,65%</b>
			30	30	100,00%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	269.999.800	205.875.000	205.158.200	<b>99,65%</b>
2	Meningkatnya kontribusi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>716.389.400</b>	<b>536.705.400</b>	<b>508.216.500</b>	<b>94,69%</b>
						<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>129.030.900</b>	<b>105.676.900</b>	<b>104.471.500</b>	<b>98,86%</b>
			75	150	200,00%	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	77.468.300	67.724.300	67.724.300	100,00%
			3	3	100,00%	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	51.562.600	37.952.600	36.747.200	96,82%
						<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>587.358.500</b>	<b>431.028.500</b>	<b>403.745.000</b>	<b>93,67%</b>

			14	14	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86.000.000	72.000.000	72.000.000	100,00%
			14	14	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	189.021.600	129.795.600	126.820.200	97,71%
			75	75	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	312.336.900	229.232.900	204.924.800	89,40%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Dinas Sosial	Nilai Sakip Dinas Sosial				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.989.716.322</b>	<b>4.404.012.824</b>	<b>4.277.651.550</b>	<b>97,13%</b>
						<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>176.045.200</b>	<b>160.214.700</b>	<b>160.214.400</b>	<b>100,00%</b>
			12	12	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.888.700	39.218.150	39.217.850	100,00%
			8	8	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.775.800	15.776.050	15.776.050	100,00%
			8	8	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.775.800	14.275.800	14.275.800	100,00%
			8	8	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.775.800	18.775.800	18.775.800	100,00%
			8	8	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.775.800	14.275.800	14.275.800	100,00%
			12	12	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.775.800	18.775.800	18.775.800	100,00%



		12	12	100,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.277.500	39.117.300	39.117.300	100,00%
Profesionalitas ASN Dinas Sosial					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.877.155.494</b>	<b>3.229.799.250</b>	<b>#####</b>	<b>96,61%</b>
		33	33	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.751.087.694	3.116.541.450	#####	96,67%
		6	6	100,00%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.635.600	89.425.600	83.665.600	93,56%
		6	6	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.432.200	23.832.200	23.832.200	100,00%
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.826.800</b>	<b>9.076.800</b>	<b>9.076.800</b>	<b>100,00%</b>
		6	6	100,00%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.826.800	9.076.800	9.076.800	100,00%
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>64.172.000</b>			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.172.000			
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>448.043.100</b>	<b>260.587.100</b>	<b>260.379.400</b>	<b>99,92%</b>
		1	1	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.236.400	4.236.400	4.236.400	100,00%
		1	1	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.015.300	44.015.300	44.015.300	100,00%

			3	3	100,00%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.182.200	69.282.200	69.272.200	96,00%
			2	2	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.609.200	143.053.200	142.855.500	90,00%
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>100,00%</b>
			1	1	100,00%	Pengadaan Mebel	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100,00%
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>434.962.722</b>	<b>448.523.524</b>	<b>442.980.793</b>	<b>95,73%</b>
			1	1	100,00%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.256.000	1.500.000	1.500.000	100,00%
			1	1	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.999.194	43.150.996	37.618.975	87,18%
			20	20	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.707.528	403.872.528	403.861.818	100,00%
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>412.776.200</b>	<b>264.311.450</b>	<b>253.188.900</b>	<b>95,79%</b>
			2	2	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.815.200	65.815.200	58.329.700	88,63%
			1	1	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.002.000	185.996.250	182.359.200	98,04%
			1	1	100,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100,00%

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.459.000			
						Jumlah	9.116.158.916	15.009.195.224		

## 1) Aspek Pendukung

### a. Personalia/sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 33 orang. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3.9.**  
**Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,**  
**Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2021**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	1 org
		Esselon III	5 org
		Esselon IV	16 org
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	1 org
		Esselon III	5 org
		Esselon IV	16 org
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Esselon II	0 org
		Esselon III	1 org
		Esselon IV	13 org
4	Jabatan Fungsional	Tidak ada	
5	Staf		9 org
6	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	0 org
		Usia diatas 30-40 Tahun	12 org
		Usia diatas 41-50 Tahun	4 org
		Usia diatas 50 Tahun	14 org
7	Pendidikan	Strata 2	1
		Strata 1	23 org
		Sarjana Muda	1 org

		SMA	5 org
		SMP	-
		SD	-
8	Jenis Kelamin	Laki-laki	16 org
		Perempuan	14 org
9	Golongan	I	-
		II	3 org
		III	21 org
		IV	6 org

Berdasarkan Tabel 3.9. tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada Tahun 2021 Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas ada 21 (dua puluh satu).
2. Dari 21 (dua puluh lima) Pejabat Struktural yang ada, terdapat 1 (satu) orang eselon II, 3 (tiga) orang pejabat eselon III dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan untuk Jabatan yang diduduki.
3. Dari 33 orang pegawai yang telah menduduki golongan IV ada 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 21 orang dan golongan II sebanyak 5 Orang.

**b. Sarana dan prasarana penunjang**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset Asset yang dikuasai SKPD sebanyak **227 (dua ratus dua puluh tujuh)** aset dengan nilai **Rp 7.315.054.289,41.**

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 memebrikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan revisi Renstra yang harus memuat keseluruhan substansi komponen jangka menengah yang terukur
2. Menyusun dokumen Renja SKPD hendaknya berorientasi pada hasil, indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
3. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja hendaknya memiliki indikator kinerja sasaran yang dapat diukur secara obyektif.

Berdasar rekomendasi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas telah melakukan :

1. Revisi Renstra.  
Revisi Renstra diharapkan dapat memuat seluruh komponen jangka menengah. Revisi target yang akan dicapai tiap tahun pun dilakukan agar lebih sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan didapat SKPD.
2. Menyusun dokumen Renja yang lebih berorientasi hasil, indikator sasaran diusahakan memenuhi indikator kinerja yang baik. Renja disusun dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas. Dan disahkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Musi Rawas.
3. Menyusun Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja sesuai dengan indikator sasaran dalam Renstra.

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis maka dapat disimpulkan Kinerja SKPD Tahun 2021 berhasil dengan **Baik**. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja Tahun 2021 yang mencapai 97,78 % pada hampir semua indikatornya.


Keberhasilan yang dicapai SKPD tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan tersebut dan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir demi tercapainya tujuan dan sasaran.

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi Renstra
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial kabupaten Musi Rawas.
5. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Muara Beliti, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**AGUS SUSANTO, A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19731213 199311 1 001**